

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya. Mengingat bahwa tiap negara memiliki akses dan ketersediaan yang berbeda, maka kerjasama di bidang ekonomi akan sangat membantu kelangsungan ekonomi serta akses terhadap barang dan jasa. Kerjasama yang terjadi antara dua negara disebut dengan kerjasama bilateral, yang dalam konteks ekonomi secara spesifik berfokus pada perdagangan. Kerjasama bilateral merupakan suatu *legal agreement* atau perjanjian hukum yang terjadi antara dua negara disertai dengan syarat serta ketentuan yang menyertainya (Goswami, 2022).

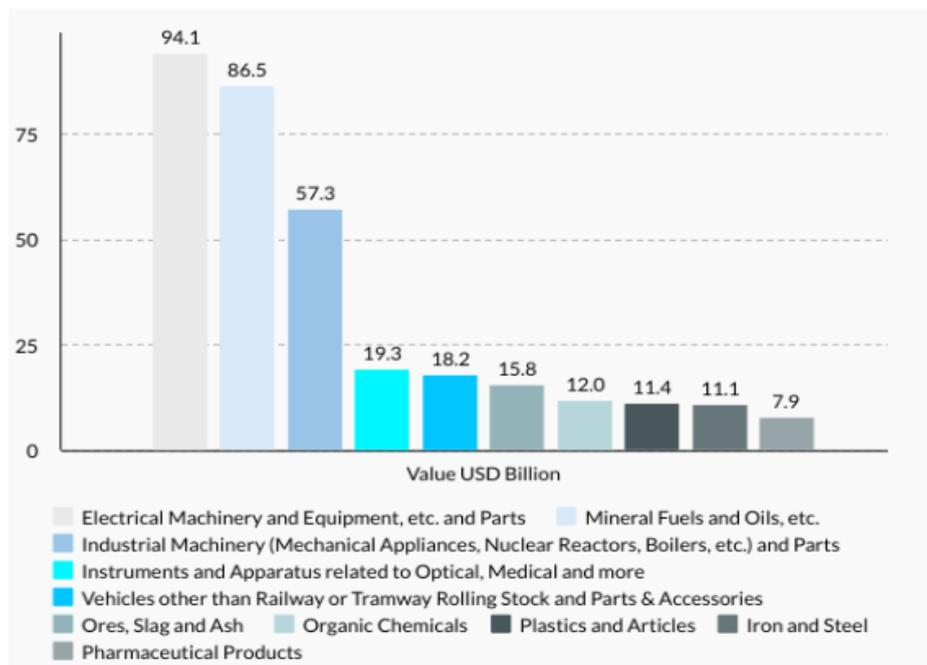
Kerjasama bilateral dalam konteks perdagangan menimbulkan potensi yang signifikan dari peningkatan perdagangan atau serta dari pengurangan perdagangan. Premis dasar dari asumsi ini ialah buah pemikiran dari Ricardian (dalam Hassler, 2003) terkait keunggulan komparatif, dimana dalam hal tersebut dinyatakan bahwasannya berbagai negara dapat memperoleh manfaat dari mengkhususkan diri pada produksi barang serta jasa dimana dalam hal ini mereka punya keunggulan komparatif. Menukarkan potensi keunggulan yang dimiliki suatu negara dengan negara yang lainnya dan menjalin kerjasama akan menguntungkan dari berbagai sisi untuk kedua belah pihak.

Indonesia turut menerapkan kerjasama bilateral guna efisiensi dan meningkatkan perekonomian. Dikutip melalui situs Kementerian Luar Negeri Indonesia (kemlu.go.id), kerjasama bilateral Indonesia dengan berbagai negara lain

sudah dimulai sejak tahun 1945 dan hingga kini, Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan setidaknya 162 negara yang dibagikan menjadi delapan kawasan antara lain adalah Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur. Kerjasama bilateral itu juga meliputi kerjasama bilateral perdagangan guna mencukupi kebutuhan Indonesia sekaligus mendatangkan devisa bagi negara.

Salah satu kerjasama perdagangan yang dijalin oleh Indonesia adalah dengan negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara tujuan utama Indonesia dalam melakukan ekspor terhadap berbagai komoditi yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Kementerian Luar Negeri, Korea Selatan merupakan pasar bagi permintaan minyak dan gas bumi, barang dan perlengkapan elektronik, minyak, dan juga baja.

Gambar 1. 1 Data Top 10 Impor Korea Selatan



Sumber: Export Genius

Berdasarkan data data, dapat diketahui bahwa permintaan akan gas dan minyak bumi dari negara Korea Selatan berada pada peringkat ke dua. *Value* dari permintaan tersebut adalah sebanyak 86,5\$ Billion USD. Permintaan yang tinggi tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadikan Korea Selatan menjadi pasar dalam ekspor minyak bumi, sebagaimana diketahui bahwa migas adalah komoditas utama dari negara Indonesia.

Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Korea Selatan telah berlangsung lama yakni lebih dari 40 tahun. Di tahun 2006, Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama dimana hal ini ditandai dengan penandatanganan *Join Declaration*. Sejak saat itu, perkembangan investasi yang terjadi antara Korea Selatan dan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun (Rompas, 2019).

Lebih lanjut di tahun 2007 (dalam Rompas, 2019), dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi perdagangan, serta investasi, kedua negara ini membentuk Indonesia-Korea *Join Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC). Kendati hubungan awalnya berjalan lancar, di tahun 2011 hingga 2015 terjadi defisit dikarenakan kondisi neraca perdagangan baik negara Korea Selatan dengan Indonesia mengalami penurunan.

Kendati sempat mengalami penurunan, hubungan antara keduanya khususnya di bidang kerjasama bilateral perdagangan segera diupayakan membaik bagi kea belah pihak. Setelah pergantian pemerintahan di Republik Korea / Korea Selatan (Korsel) pada bulan Mei 2017, Presiden Moon Jae-in menetapkan kebijakan *New Southern Policy* yang mengarah pada peningkatan hubungan Koresel dengan negara-negara ASEAN dan India. Dalam konteks implementasi kebijakan *New*

Southern Policy, arah perkembangan yang krusial ini dicatat terkait kunjungan pertama Presiden Moon ke luar negeri di bulan November 2017. negara tujuan tersebut adalah Indonesia. pada kunjungan tersebut, presidenmu serta Presiden Jokowi bersepakat dalam melakukan peningkatan status relasi antara kedua negara menjadi “*Special Strategic Partnership*”. Kedua pemimpin memiliki suatu kesepakatan bahwasannya kemitraan yang dijalin antar negara tidak hanya sebatas relasi transaksional namun juga dilandaskan atas semangat membantu satu sama lain (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Hubungan Indonesia-Korea Selatan ini juga diperkuat dengan adanya Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) yang merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dimana hal ini meliputi perdagangan berbagai barang, jasa, serta penanaman modal, kerjasama perekonomian, hukum, berikut dengan kelembagaan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini bersetuju dan menyepakati melalui ratifikasi perjanjian perdagangan lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 yang diundangkan pada September 2022 lalu dan secara resmi telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023 (Nabila Salsa Bila & Hasna Wijayati, 2022).

Di berbagai kesempatan, Indonesia dan Korea Selatan memanfaatkan momentum untuk menjalin kerjasama sebagai bentuk diplomasi. Salah satu forum yang berperan penting dalam kaitannya hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia adalah pada forum G20. Menurut (Saravistha et al., 2023) juga menjelaskan bahwa “forum G20 ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi krisis global di sektor ekonomi pada Tahun 1997 sampai sekitar

Tahun 1999 dengan keterlibatan negara-negara berkembang, maju dan berperan dalam perekonomian dunia seperti Indonesia.” Atas saran dari para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global yang terjadi. Ada dua isu sentral dalam materi G20, yaitu *Finance Track* dan *Sherpa Track*. Adapun isu *Finance Track* ini menitikberatkan pada sektor ekonomi dan keuangan diantaranya kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, perpajakan internasional yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara anggota masing- masing. Sedangkan *Sherpa Track* yang memberikan penekanan pada isu yang mencakup permasalahan geopolitik, anti korupsi, pembangunan, energi, perubahan iklim, pengaruh utamaan gender, dan perdagangan sebagaimana dalam hal ini diwakili oleh kementerian yang berelevansi dengan hal tersebut. serangkaian pertemuan ini dihadiri oleh berbagai negara anggota yang berjalan secara paralel dimulai dari tingkat deputi terkait konsep kesepakatan menyusutkan berbagai isu untuk akhirnya dibahas pada level menteri.

Indonesia mulai menjadi bagian dari G20 tepatnya di tahun 1999. pada periode tersebut Indonesia berada pada proses pemulihan keadaan ekonomi setelah tahun 97 hingga 98 sebab terjadi krisis moneter di Indonesia. negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi perwakilan atas berbagai negara berkembang di kawasan Asia tenggara yang dinilai punya potensi di bidang perekonomian. Forum G20 memiliki peranan yang sangat signifikan. Forum ini memiliki kekuatan konsolidasi yang tinggi, dimana keberadaan forum ini mampu memfasilitasi perumusan komitmen bersama antar negara. Hal ini berbeda dengan

forum dengan skala besar—PBB misalnya, dimana pada forum tersebut akan sangat mudah dijumpai kritik dan sanggahan sehingga akan amat lambat dalam menangani berbagai permasalahan global yang terjadi (Saputra & Ali, 2021).

Menurut (Yanthi et al., 2022) menjelaskan bahwa di tahun 2022 Indonesia memperoleh kepercayaan dalam rangka melanjutkan perjalanan presidensi g20 dari Italia. ini adalah kali pertamanya bagi Indonesia memegang presidensi ini dan acara ini dilaksanakan di tanggal 1 Desember 2021 dan berlangsung hingga November 2022. Indonesia mendapatkan mandat sebagai ketua presidensi g20 hingga 1 tahun mendatang di tanggal 1 Desember 2021. forum bergengsi dan berpengaruh ini terdiri dari 19 negara utama serta satu Uni Eropa. forum ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi serta 75%, internasional trade dan 80% pendapatan dunia.

Indonesia berkesempatan dalam memimpin forum negara-negara dalam KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi). Dengan terpilihnya Indonesia maka sah-lah Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke lima setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pada Presidensi G20 akan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” dengan adanya pertemuan besar ini maka perwakilan dari 20 Negara dan hal ini berimbas pada negara Indonesia yang menjadi *spotlight* di mata dunia (Santi et al., 2022). Salah satu peserta yang hadir di acara ini adalah Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan.

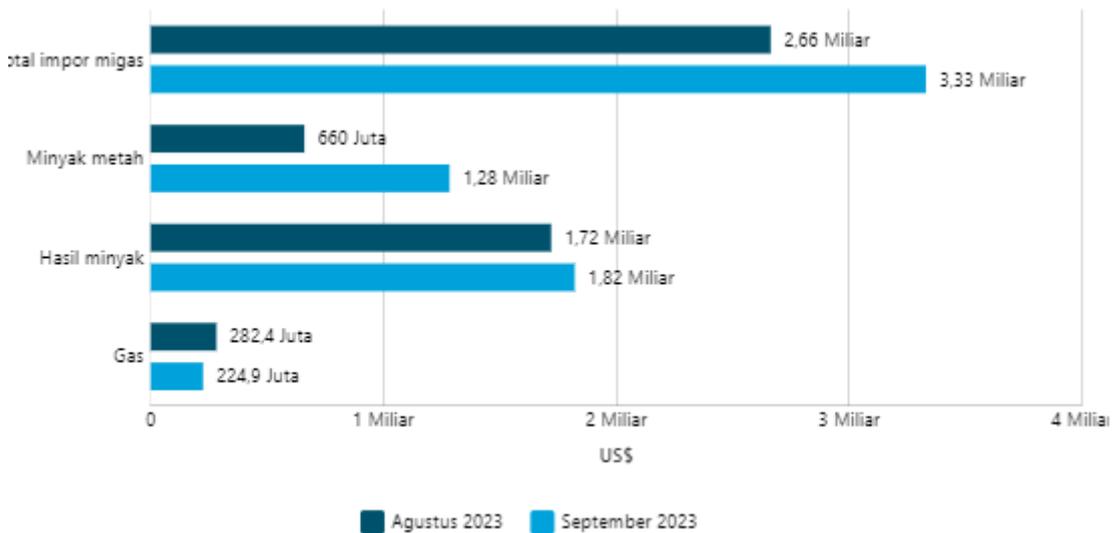
Momentum sebagai presidensi Indonesia atas forum ini adalah momentum yang baik potensial bagi negara Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan berbagai negara yang dalam hal ini utamanya Korea Selatan. Direktur

Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto juga memberikan penjelasan bahwasannya penerapan perjanjian ini memiliki potensi dalam menaikkan lalu lintas perdagangan diantara dua negara. guna memberikan dukungan atas kemitraan tersebut, dalam perjanjian ini negara Korea akan melakukan liberalisasi sebanyak kurang lebih 95% dari keseluruhan pos sejumlah 12.223 tarif, sementara negara Indonesia sendiri melakukan liberalisasi sebanyak 92%.. Selain itu, sejak perjanjian mulai berlaku (EIF), sebanyak 92 persen pos tarif di Korea akan dihapuskan menjadi nol persen, sementara di Indonesia sebanyak 86 persen pos tarif akan dieliminasi. Dalam jangka panjang, sekitar 3,4 persen pos tarif di Korea dan 5,6 persen di Indonesia akan dikurangi secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 20 tahun ke depan. Diperkirakan dalam lima tahun mendatang, kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan hingga USD 21,9 miliar, mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43 persen, serta meningkatkan ekspor sebesar 19,8 persen dan impor sebesar 13,8 persen. (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Melalui kerjasama bilateral ini dapat meningkatkan ekspor maupun impor dalam negeri yang akan berjalan dengan selaras. Dari sisi ekspor mampu membantu angka ekspor maupun impor yang ada akan seimbang. pada sisi ekspor hal ini bisa memberi devisa untuk negara dan sementara itu dari sisi impor maka negara mampu memberi bantuan berupa peningkatan berbagai barang barang di pasar domestik. dalam konteks produk yang bisa diekspor maupun diimpor diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni migas dan non migas. ragam produk non migas antara lain adalah kakao, keju, alas kaki, dan lainnya. sementara itu ragam produk migas antara lain adalah minyak bumi dan juga gas alam. dari kekayaan yang melimpah terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia, salah satu energi yang sangat memiliki

kebermanfaatan bagi kehidupan manusia adalah gas alam. dengan berbagai macam pemanfaatan yang dimiliki oleh gas alam maka tidak bisa dipungkiri bahwasannya kebutuhan masyarakat dunia akan terus-menerus mengalami peningkatan.

Gambar 1. 2 Nilai Impor Migas Indonesia (Agustus 2023-September 2023*)



Sumber: Katadata (2023).

Berdasarkan data di atas, laporan BPS bahwasannya nilai impor migas Indonesia mencapai US\$3,32 miliar pada September 2023. Jumlah itu naik 25,04% (mom) jika dikomparasikan bulan Agustus 2023 yang nilainya US\$2,66 miliar. Hal ini menunjukkan dengan adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan akan memberikan dampak yang baik untuk ke depannya terutama di sektor perdagangan migas. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan judul yaitu **“Bagaimana Dampak Presidensi G20 Terhadap Sektor Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan?”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah

yang dirumuskan pada penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak Presidensi G20 terhadap sektor perdagangan bilateral (migas) dari Indonesia ke Korea Selatan?”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis akan membatasi masalah supaya dapat terfokuskan pada satu permasalahan yaitu penelitian ini berfokus pada dampak Presidensi G20 terhadap sektor perdagangan bilateral (migas) dari Indonesia ke Korea Selatan. Pada konteks ini, pembatasan waktunya adalah dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengacu pada presidensi Indonesia di G20 yang berada pada tahun 2021 akhir dan kondisi saat ini sehingga pembatasan tahunnya adalah hingga saat ini yakni 2024. Aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini adalah baik pemerintah Indonesia maupun Korea Selatan serta berbagai perusahaan dibawah naungan pemerintah maupun swasta yang masih berelevansi dengan topik penelitian.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memahami dampak Presidensi G20 terhadap sektor perdagangan bilateral (migas) Indonesia-Korea Selatan merupakan salah satu tujuan utama dari penelitian ini dilakukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Di bawah ini merupakan tujuan dan kegunaan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak Presidensi G20 terhadap sektor perdagangan bilateral (migas) Indonesia-

Korea Selatan. Beberapa tujuan spesifik yang dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

- 1.4.1.1 Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pasca Presidensi G20 periode tahun 2021-2024 terhadap sektor perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan.
- 1.4.1.2 Menganalisis dampak Presidensi G20 yang berkaitan pada sektor perdagangan bilateral (migas) Indonesia-Korea Selatan
- 1.4.1.3 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap dampak Presidensi G20.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Riset ini diekspektasikan mampu memberi sumbangsih dalam bidang keilmuan khususnya Hubungan Internasional dan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana dampak Presidensi G20 terhadap sektor perdagangan bilateral (migas) Indonesia-Korea Selatan. Berikut ini merupakan kegunaan penelitian yang lebih signifikan yaitu:

- a. Penelitian ini akan membantu mengetahui hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang perdagangan dan dapat memberikan wawasan tentang dampak ekonomi bilateral yang mungkin dihadapi oleh Korea Selatan dan Indonesia.
- b. Kegunaan praktis sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Internasional Universitas Pasundan.